

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam fenomena kebhinekaan yang mencerminkan keragaman budaya masyarakat Indonesia, dapat dilihat pada beragam suku bangsa dengan nilai kultur yang terdiversifikasi. Kehadiran etnis Tionghoa dapat dieksplorasi dengan perilaku, kebiasaan, dan cara berpikir yang berbeda dibandingkan dengan etnis lain di Indonesia. Perbedaan antara kelompok etnis telah menciptakan sebuah situasi di mana masing-masing kelompok merasa lebih nyaman berinteraksi dengan kelompok lain, sehingga aliansi suku-suku terbentuk. Aliansi etnis ini bervariasi, mulai dari kelompok etnis yang membentuk organisasi khusus hingga partai politik yang didominasi oleh suku tertentu. Akibatnya, politik etnis menjadi ciri khas dari masyarakat majemuk, di mana persaingan politik sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan etnis (Satya, 2013).

Organisasi politik yang diinisiasi oleh kelompok etnis cenderung mengikuti prinsip preferensi dan loyalitas etnis dalam masyarakat. Etnisitas menjadi dasar yang dinamis untuk aktivitas politik. Proses menonjolkan satu kelompok etnis dalam suatu organisasi politik disebut sebagai saliensi etnis. Bahkan sejak zaman kolonial, telah ada partai politik yang didirikan oleh individu dari kelompok etnis Tionghoa dengan penekanan pada kekrusialan etnis mereka. Pada zaman Hindia-Belanda, keberagaman masyarakat Indonesia dilihat sebagai masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih kelompok yang hidup berdampingan tanpa percampuran dalam kerangka politik yang satu (Pratama, 2016).

Etnis Tionghoa di era Pemerintah kolonial Belanda melakukan politik separatisme antargolongan penduduk atau mencoba mengisolasi antara satu golongan dengan golongan yang lain. Penduduk dibagi dalam tiga golongan, yaitu warga negara kelas satu yang terdiri dari orang-orang Belanda dan bangsa kulit putih umumnya, warga negara kelas dua yang terdiri dari Vreemde Oosterlingen yaitu orang India, Arab, Tionghoa, dan orang-orang Timur Asing lainnya. Menjelang akhir abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda juga mengeluarkan aturan-aturan lain yang intinya adalah untuk membatasi gerak langkah etnis Tionghoa di Indonesia (Pratama, 2016). Melalui Wijkenstelsel pemerintah kolonial menciptakan sejumlah pusat pemukiman etnis Tionghoa di beberapa kota besar di Indonesia yang disebut sebagai kampung pecinan. Etnis Tionghoa diisolasi secara fisik sehingga antara etnis Tionghoa dengan penduduk pribumi benar-benar terpisah. Selain wijkenstelsel, pemerintah kolonial juga memberlakukan passenstelsel (pas jalan) yang mengharuskan etnis Tionghoa untuk meminta izin bila akan melakukan perjalanan (Yudono, R. M., 2018).

Kemudian di Era Orde Lama, Pada tahun 1932 didirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang secara langsung menentang Chung Hwa Hui. PTI meminta masyarakat Tionghoa Hindia Belanda untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai masyarakat Indonesia dan menyetujui upaya kalangan nasionalis Indonesia dalam membentuk sebuah pemerintahan sendiri dan akhirnya Indonesia yang merdeka melalui cara-cara konstitusional. PTI bersikap anti Belanda dan menolak nasionalisme Tiongkok. PTI bekerja sama dengan pergerakan nasionalis Indonesia. Selain melalui PTI, orang-orang etnis Tionghoa di Indonesia tidak sedikit yang

terlibat dalam dunia pergerakan nasional, mereka turut andil dalam menacapai kemerdekaan. Misalnya, turut sertanya etnis Tionghoa dalam “Sumpah Pemuda” yang telah meletakkan dasar yang penting bagi lahirnya bangsa Indonesia, yaitu Kwee Thiam Hong, Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok, Tjio Djien Kwie. Selain itu juga terdapat empat orang Tionghoa yang duduk dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yaitu Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei, Mr. Tan Eng Hua, dan Liem Koen Hian (Suryadinata, 2003).

Setelah berakhirnya era pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah modernnya, ditandai dengan munculnya rezim Orde Baru. Nama "Orde Baru" pada awalnya digunakan untuk membedakan era baru ini dari masa pemerintahan sebelumnya, yang dikenal sebagai Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Rezim Orde Baru ini dipimpin oleh Jenderal Soeharto, seorang pemimpin militer dengan latar belakang yang berbeda. Rezim Orde Baru menerapkan struktur politik yang menekankan beberapa aspek, termasuk oligarki politik, korporatisme otoriter, dan ekonomi kapitalistik yang terpusat. Tiga aspek ini yakni politik, ekonomi, dan korporatisme, saling terkait dalam membentuk fondasi pemerintahan Soeharto yang kuat (Lukum, 2005).

Di bidang ekonomi, rezim Orde Baru mengadopsi pendekatan korporatisme otoriter, di mana pemerintah memiliki kendali kuat atas perekonomian negara. Pendekatan ekonomi yang diterapkan adalah ekonomi kapitalistik yang terpusat pada kelompok tertentu. Ini akhirnya menyebabkan terkonsentrasinya kekuasaan ekonomi di tangan sejumlah kelompok elit termasuk keluarga Soeharto, anggota militer yang berpengaruh birokrat tinggi dan elite bisnis yang memiliki beragam

latar belakang termasuk etnis Tionghoa. Dalam ranah ekonomi, etnis Tionghoa memainkan peran yang signifikan dalam jaringan ekonomi negara ini. Namun, dalam konteks politik mereka menghadapi kendala dan pembatasan dari pemerintah Soeharto. Situasi ini mencerminkan peran sejarah etnis Tionghoa sebagai golongan perantara dalam perdagangan dan ekonomi mirip dengan peran yang mereka mainkan selama masa penjajahan Belanda. Meskipun terlibat secara luas dalam kegiatan ekonomi, peran politik mereka dibatasi dalam kerangka korporatisme otoriter yang mendominasi masa itu (Pratama, 2016).

Selama era reformasi dalam sejarah Indonesia, perkembangan demokrasi di negara ini telah membuka peluang yang lebih besar bagi warga keturunan Tionghoa untuk aktif berpartisipasi dalam politik, terutama dengan menggunakan hak pilih mereka dan terlibat secara langsung dalam proses politik. Meskipun perkembangannya terkadang terlihat lambat, partisipasi mereka dalam pemilihan politik dan kegiatan politik secara umum telah menjadi perhatian utama pemerintah (Satya, 2013). Dalam berbagai arena politik dan dalam setiap pesta pemilihan, etnis Tionghoa menonjol sebagai kelompok etnis yang menarik perhatian pemerintah. Harapannya adalah bahwa hubungan yang positif akan tumbuh dari fondasi bisnis yang mengedepankan saling percaya dan efisiensi (Juliastutik, 2010) . Namun, pada kenyataannya, terkadang dalam ranah ekonomi, hubungan ini seringkali hanya dimanfaatkan oleh penguasa untuk mempertahankan posisi mereka dalam berbagai aspek kekuasaan dan pengaruh. Sehingga, meskipun terdapat upaya untuk mempromosikan kolaborasi dan integrasi yang lebih luas, kenyataan politik dan ekonomi seringkali memainkan peran sentral dalam dinamika ini.

Indonesia, dengan keragaman etnis yang begitu mencolok, telah menjadi panggung bagi fenomena pluralisme yang dalam benaknya merasuk ke dalam keragaman etnis yang terwujud di tengah-tengah masyarakatnya. Seharusnya, keragaman etnis ini menjadi pilar utama yang memupuk semangat persatuan di antara seluruh warga negara. Namun, kenyataannya seringkali berbeda, di mana isu-isu etnis justru menjadi ancaman bagi kesatuan. Permasalahan yang bersinggungan dengan etnisitas kerap mencuat dalam dunia politik. Bahkan, tidak terkecuali dalam setiap tahap pemilihan, dari tingkat kepala desa hingga pemilihan presiden. Masyarakat Indonesia dalam banyak kesempatan tampak sangat peka terhadap isu-isu etnis ini sehingga isu-isu tersebut dengan mudah dimasukkan ke dalam konteks aktivitas politik (Isra, 2010).

Konsep etnisitas mengusung pengertian mendalam dalam ranah politik, di mana hal tersebut mencerminkan suatu sistem atau kelompok sosial yang diberikan status atau posisi khusus berdasarkan warisan keturunan, tradisi, agama, bahasa, serta unsur-unsur lainnya. Dalam lanskap politik etnisitas kerap dihubungkan dengan ide nasionalisme (Lukum, 2005). Dalam penjelasan yang lebih dalam etnisitas ini membawa gagasan tentang pemisahan peran serta perbedaan yang berkaitan dengan asal-usul dan ciri budaya yang menjadi ciri khasnya. Oleh karena itu tidak dapat dihindari bahwa etnisitas memiliki pengaruh yang signifikan dalam dunia politik dan di sisi lain, politik juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi dinamika etnisitas dalam kehidupan sehari-hari.

Sejarah panjang etnis Tionghoa di Indonesia dimulai pada masa Dinasti Han (206 SM - 220 SM), di mana mereka datang dengan maksud berdagang

menyebarkan agama Buddha serta berkontribusi dalam penyebaran pengetahuan lainnya. Jejak pertama mereka di kepulauan ini mewujudkan keragaman budaya yang kaya dan beragam di antara masyarakat Indonesia. Kemudian perkembangan komunitas Tionghoa semakin pesat setelah Laksamana Cheng Ho menjalankan pelayaran krusialnya ke Nusantara. Dalam konteks ini mereka turut membawa serta nilai-nilai agama kearifan lokal dan kontribusi budaya lain yang membentuk keragaman budaya Indonesia (Festianto, 2020).

Pengenalan etnis Tionghoa ke dalam lanskap politik Indonesia dimulai pada masa penjajahan kolonial Belanda. Waktu itu, wilayah ini ditempati oleh beragam kelompok non-pribumi yang bermigrasi ke tanah air ini. Belanda, dalam mengelola kepemimpinan kolonialnya, menerapkan kebijakan pemisahan golongan yang mengakibatkan etnis Tionghoa, bersama dengan kelompok-kelompok lain seperti orang India, Arab, dan kelompok etnis lainnya, ditempatkan dalam posisi sebagai warga kelas dua. Meskipun berada dalam posisi yang kurang diuntungkan etnis Tionghoa tidak hanya harus menghadapi ketidakadilan yang sistematis tetapi juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang melekat dalam kebijakan pas jalan atau *passenstelsel*. Kebijakan ini tidak hanya membatasi pergerakan mereka, tetapi juga menempatkan kendali besar dalam tangan pemerintah Belanda (Nawir, 2019).

Dalam berbagai aspek politik di Indonesia, konsep etnisitas memainkan peran krusial. Hal ini mencakup berbagai kebijakan dan praktik politik yang mencerminkan latar belakang etnis dan budaya individu. Dengan demikian, etnisitas memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan politik Indonesia dan

sebaliknya politik memiliki kemampuan untuk membentuk atau dalam beberapa kasus merubah dinamika etnisitas dalam masyarakat sehari-hari (Juliastutik, 2010).

Kehadiran etnis Tionghoa di Indonesia telah menjalin sejarah yang sangat dalam dan berkelanjutan, yang dimulai sejak masa Dinasti Han pada tahun 206 SM hingga 220 SM. Pada awalnya, etnis Tionghoa tiba di kepulauan ini dengan niat utama untuk berdagang, menyebarkan agama Buddha serta berkontribusi dalam penyebaran pengetahuan lainnya. Seiring berlalunya waktu komunitas etnis Tionghoa di Indonesia terus tumbuh pesat terutama setelah pelayaran krusial Laksamana Cheng Ho ke Nusantara. Peranan mereka dalam memperkaya dan merajut keragaman budaya di Indonesia memiliki dampak yang sangat krusial (Pratama, 2016).

Namun, sejarah politik etnis Tionghoa di Indonesia benar-benar dimulai pada era kolonial Belanda. Pada periode tersebut tanah air dihuni oleh banyak pendatang non-pribumi yang menetap di Indonesia dan Belanda menjalankan kebijakan segregasi yang memecah belah warga berdasarkan latar belakang etnis. Dalam kerangka ini etnis Tionghoa dan kelompok lain seperti orang India, Arab, dan kelompok etnis lainnya ditempatkan dalam kelas warga yang lebih rendah. Terlepas dari posisi ini etnis Tionghoa masih harus menghadapi ketidakadilan yang sistematis serta pengaturan ketat dari pemerintah Belanda (Armawi, 2015). Selain itu izin dari pemerintah Belanda diperlukan bahkan untuk perjalanan sederhana. Perilaku politik yang mencakup semua tindakan yang berkaitan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat umum serta pemerintah. Dengan demikian etnis Tionghoa telah

memainkan peran krusial dalam membentuk arah politik Indonesia, sambil merasakan dampaknya di berbagai aspek kehidupan sosial dan politik (Sanipar, 2002).

Kegiatan ini pada hakekatnya terbagi menjadi dua yaitu tugas pemerintah dan tugas politik masyarakat. Pada awalnya perilaku dan aspirasi masyarakat Tionghoa masih dalam tahap keikutsertaan dalam pemilihan anggota legislatif dan eksekutif, kemudian perilaku mereka berkembang lebih lanjut ketika mereka mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dan eksekutif. Pada awalnya perilaku dan aspirasi masyarakat Tionghoa masih dalam tahap keikutsertaan dalam pemilihan anggota legislatif dan eksekutif, kemudian perilaku mereka berkembang lebih lanjut ketika mereka mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dan eksekutif (Laode, 2012).

Peran etnis Tionghoa dalam kerangka sosial dan politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor sejarah yang membentuk fondasi mereka. Faktor sejarah ini telah menjadikan peran mereka yang terkait dengan kehidupan sosial dan politik sebagai aspek yang sangat menonjol. Peran etnis Tionghoa di Indonesia telah dimulai sejak periode perdagangan rempah-rempah di kepulauan Nusantara, yang melibatkan peran mereka sebagai pelaku utama. Sejarah panjang ini mencakup kediaman komunitas Tionghoa di berbagai wilayah pesisir di Indonesia seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, yang terjadi jauh sebelum kedatangan kolonial Belanda di Nusantara. Bahkan pada masa itu, para penguasa lokal mendapati masyarakat Tionghoa sebagai pedagang perantara yang sangat berharga. Peran ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas perdagangan tetapi juga untuk mencegah konflik yang mungkin muncul di antara penguasa lokal,



serta untuk menghindari persaingan yang dapat mengganggu perdagangan komoditas nusantara (Lukum, 2005).

Pernah ada Partai Bhineka Indoensia adaah parpol yang berbadan hukum untuk etnis, Pada tahap sebelum pemilu, telah terbentuk beberapa partai baru yang secara terbuka menyatakan akan memperjuangkan aspirasi etnis Tionghoa. Partai-partai itu adalah Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika, Partai Pembaharuan Indonesia dan Partai Warga Baru Indonesia. Berdirinya partai-partai baru ini dihadapkan pada kondisi obyektif masyarakat keturunan Tionghoa yang masih mengambil jarak cukup jauh dari politik praktis. Kemunculan partaipartai yang membawa nama Tionghoa dinilai hanya akan membawa kerugian secara politik, dan dikhawatirkan memancing resksi antipati di kalangan masyarakat luas. Inilah alasan mengapa komunitas Tionghoa memiliki peran sejarah yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan di wilayah-wilayah pesisir Indonesia (Juliaستutik, 2010). Selain menjadi perantara perdagangan mereka juga memainkan peran dalam pertukaran budaya dan pengetahuan antara berbagai kelompok masyarakat di wilayah ini. Dengan warisan sejarah yang kaya ini masyarakat Tionghoa telah menanamkan akar yang kuat dalam lanskap sosial dan politik Indonesia yang pada gilirannya telah memengaruhi peran mereka dalam dinamika sosial-politik di negara ini (Buchari, 2014). Berbagai faktor eksternal yang ada telah mendorong masyarakat etnis Tionghoa untuk mengalihkan perhatian mereka ke sektor ekonomi. Salah satu contoh yang sangat menarik adalah bagaimana beberapa anggota etnis Tionghoa telah mampu meraih sukses dalam

dunia politik seperti yang tampak dalam perjalanan karier Ahok, yang berhasil mencuri perhatian banyak orang.

Peran politik Ahok dimulai ketika ia terlibat dalam dunia politik sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2004. Setelah itu, ia terus naik pangkat hingga akhirnya menjadi Bupati Belitung Timur pada tahun 2005. Pada tahun 2007, Ahok mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung, meskipun akhirnya tidak terpilih. Jejak politiknya terus berkembang hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan kursi di DPR pada tahun 2009 sebagai anggota Komisi II. Namun, puncak karier politiknya tercapai ketika ia bersama Jokowi memenangkan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2012 (Tjantje Tjiptabudi, 2014).

Perlu diingat bahwa pengadaan pemilihan kepala daerah yang sebesar ini memerlukan investasi yang besar melibatkan berbagai jenis modal. Modal-modal ini termasuk modal sosial modal ekonomi modal simbolik dan modal budaya, yang masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam mencapai kemenangan dalam pemilihan kepala daerah. Penting untuk dicatat bahwa perlunya modal ini sudah mulai tampak sejak tahap awal, termasuk dalam proses pencalonan dan seleksi oleh partai politik. Proses seleksi ini seringkali bersifat elit yang pada akhirnya membuat sejumlah calon kepala daerah merasa kesulitan mendapatkan dukungan dari partai politik (Agus, 2014). Dalam konteks tertentu istilah "elitis" merujuk pada dominasi yang dilakukan oleh elite internal partai politik dalam mengatur proses rekrutmen calon kepala daerah. Sebagai catatan dalam tahapan ini seorang calon yang diusung oleh pengurus partai di tingkat daerah bahkan perlu memperoleh persetujuan dari

pengurus partai di tingkat pusat sebelum bisa mencalonkan diri. Era reformasi yang diawali pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, dianggap sebagai periode yang memberikan kemerdekaan yang lebih besar bagi masyarakat etnis Tionghoa (Nurhidayat, 2016).

Hal ini tampak jelas dalam tindakan pemerintah yang mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 yang menghentikan penggunaan istilah Pribumi dan Non Pribumi. Di bawah pemerintahan K.H. Abdurahman Wahid, masyarakat etnis Tionghoa diberikan kebebasan penuh untuk merayakan budaya mereka termasuk perayaan Imlek tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia yang mulai diterapkan pada bulan Juni 2005, sering dianggap sebagai lompatan besar dalam proses demokratisasi. Sistem ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk secara langsung memilih kepala daerah mereka melalui mekanisme pemungutan suara dan tindakan ini dianggap sebagai tonggak penting dalam mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan berpartisipasi (Juliastutik, 2010).

Selain pertimbangan mahar politik seorang calon kandidat yang akan diusung oleh partai politik harus membangun dukungan yang kokoh di tingkat akar rumput. Dukungan ini melibatkan jaringan hubungan pribadi yang kuat, persetujuan dan dukungan dari tokoh agama serta tokoh masyarakat di sekitar wilayahnya dan dukungan dari masyarakat umum. Oleh karena itu modal sosial modal simbolik dan modal budaya, baik yang berwujud maupun yang tidak harus dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara maksimal agar calon dapat mencapai kesuksesan dalam dunia politik.

Pada Pemilihan Umum tahun 2004, tidak ada satu pun partai politik yang berbasis etnis Tionghoa yang berhasil memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, maupun berhasil melewati tahap verifikasi faktual yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Para pendiri partai politik etnis Tionghoa tersebut kemudian memutuskan untuk bergabung sebagai kandidat dari partai politik lain yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu. Meskipun lebih dari dua ratus calon legislatif etnis Tionghoa ikut dalam pemilu tidak satupun di antara mereka yang berhasil menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (Puspoyo, 2012). Partai politik yang berbasis etnis dijalankan oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dianggap memiliki prospek yang terbatas. Isu etnis ini dianggap sangat sensitif karena berkaitan dengan isu-isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Pembatasan pendirian partai politik berbasis etnis dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena dapat membatasi hak warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Sebaliknya, pendirian partai politik berbasis etnis juga bisa memecah belah persatuan dalam masyarakat (Andiwilaga, 2019).

Peran yang dimainkan oleh etnis Tionghoa telah menjadi elemen penting dalam sejarah Indonesia, jauh sebelum Republik Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya dan negara ini akhirnya terbentuk. Bahkan sejak munculnya Partai Tionghoa Indonesia, beberapa tokoh keturunan Tionghoa, seperti Kho Sien Hoo, telah bergabung dalam gerakan kemerdekaan, berkontribusi secara aktif pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah berdirinya Negara Indonesia, warga Tionghoa yang telah menjadi warga negara Indonesia diakui sebagai bagian integral

dari keragaman etnis yang ada di Indonesia dan diberi status yang setara dengan kelompok etnis lainnya.

Kebudayaan dan keyakinan suatu komunitas seringkali memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk identitas mereka. Etnis Tionghoa menganut keyakinan dalam berbagai ajaran termasuk Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Di antara ajaran-ajaran ini Konfusianisme mendominasi dalam komunitas etnis Tionghoa (Leovandita, 2013). Ajaran Konfusianisme menekankan pentingnya moralitas dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebagai dasar untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini yang diajarkan oleh Konfusius, memainkan peran utama dalam membentuk tatanan sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh etnis Tionghoa (Agus, 2014).

Minat partisipasi masyarakat Tionghoa dalam proses pemilihan umum dan terlibat dalam ranah politik di Indonesia didorong oleh sejumlah faktor yang beragam. Di antara faktor-faktor tersebut, yang sangat berperan adalah perbaikan dalam dinamika politik dan manajemen pemerintahan Republik Indonesia sejak dimulainya era reformasi. Reformasi ini telah membawa dampak positif yang signifikan pada tata kelola pemerintahan serta memperkuat fondasi demokrasi di negara ini. Selain itu semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Tionghoa terhadap semangat nasionalisme dan nilai-nilai toleransi, telah menjadi faktor yang sangat penting dalam mengubah pandangan dan perilaku masyarakat. Mereka sekarang lebih cenderung menilai calon pemimpin berdasarkan kompetensi, kualitas kepemimpinan, kredibilitas dan bukan lagi berdasarkan latar belakang etnis atau warna kulit (Suryadinata, 2003).

Tidak kalah pentingnya adalah perkembangan tingkat kepercayaan diri yang semakin berkembang di kalangan masyarakat Tionghoa. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengatasi trauma masa lalu yang mungkin melibatkan pengalaman pahit dan kesulitan, dan mendorong mereka untuk menjadi aktor aktif dalam politik dan pembangunan negara. Seiring dengan semakin berkembangnya rasa percaya diri ini masyarakat Tionghoa semakin terlibat secara konstruktif dalam berkontribusi pada masyarakat Indonesia yang plural dan beragam (Nawir, 2019).

Generasi muda dalam komunitas Tionghoa menunjukkan minat yang kuat dalam berpartisipasi dalam politik terutama dalam upaya untuk mencapai kesetaraan dengan warga pribumi. Mereka secara aktif melibatkan diri dalam demokrasi politik dengan tujuan memengaruhi pembuat kebijakan dan elit politik agar mengambil tindakan yang mendukung kepentingan etnis Tionghoa (Laode, 2012). Dalam dinamika politik peran identitas etnis sangat penting di mana kelompok etnik, agama, bahasa, dan faktor lainnya bersatu untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam masyarakat yang demokratis dan inklusif.

Seiring berjalannya waktu politik etnis semakin mencuat terutama sejak dimulainya era reformasi di Indonesia. Perkembangan ini sejalan dengan penerapan kebijakan desentralisasi politik oleh pemerintah. Era reformasi membawa perubahan positif dalam bentuk keterbukaan, demokratisasi, dan otonomi daerah, namun dampak sampingannya adalah penguatan identitas etnis. Gerakan politik etnis semakin berkembang dan menjadi semakin terlihat dalam arena politik. Banyak aktor politik baik di tingkat lokal maupun nasional secara sengaja

memanfaatkan isu-isu etnis dalam upaya mereka untuk memperebutkan kekuasaan (Juliastratik, 2010).

Pada tingkat lokal, pemilihan umum dan perilaku pemilih dalam masyarakat yang terpecah-pecah secara etnis telah menjadi fokus perhatian akademik. Beberapa sarjana telah menyampaikan kekhawatiran mereka bahwa pemilihan umum di masyarakat yang terbagi secara etnis dapat menghasilkan pemilihan yang didasarkan pada kriteria etnis yang mungkin merusak prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun demikian, masih ada perdebatan yang berkelanjutan mengenai alasan mengapa pemilih memilih berdasarkan etnis. Beberapa berpendapat bahwa pemilih memilih calon berdasarkan etnis karena mereka percaya bahwa calon tersebut akan memperjuangkan kepentingan (Tanassaldy, 2007).

Reformasi di Indonesia telah mencapai sejumlah pencapaian yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan negara. Salah satu hasil terpentingnya adalah munculnya beragam partai politik yang mencerminkan beragam ideologi, aspirasi, dan latar belakang politik dalam masyarakat. Reformasi telah membuka ruang bagi kemunculan puluhan partai politik yang digalang oleh berbagai kelompok masyarakat. Setiap partai mewakili spektrum ideologi yang beragam mencerminkan semangat pluralisme politik yang menjadi ciri khas Indonesia pasca-reformasi. Tidak hanya dalam ranah politik, reformasi juga telah mengilhami peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya berperan aktif dalam proses politik. Peningkatan partisipasi ini bukan hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga dalam berbagai upaya pemulihan ekonomi dan pembangunan yang dilakukan di seluruh

negeri. Dalam konteks ini, reformasi tidak hanya sekadar perubahan struktur politik tetapi juga perubahan perilaku politik masyarakat (Sanipar, 2002).

Dampak penting lainnya dari reformasi adalah munculnya desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal. Desentralisasi telah memungkinkan adanya kebijakan-kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Otonomi daerah juga memicu perkembangan pemerintahan lokal yang lebih responsif terhadap kepentingan warga. Selain itu, reformasi telah menegaskan komitmen dalam upaya penegakan hukum dan perlawanan terhadap korupsi. Prinsip-prinsip keadilan dan integritas dikedepankan dalam tindakan pemerintah. Penegakan hukum dan kampanye anti-korupsi dilakukan secara tegas dan transparan, menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel (Pide, Andi, 2009).

Kampanye perlindungan hak asasi manusia juga semakin intensif pasca-reformasi. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Reformasi juga telah memicu kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak individu. Reformasi juga mencerminkan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan integritas. Proses pemilihan umum yang adil dan jiber merupakan bukti komitmen untuk menjalankan demokrasi yang sejati. Secara keseluruhan reformasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan Indonesia baik dalam ranah politik, ekonomi, hukum, maupun hak asasi manusia. Reformasi adalah tonggak sejarah yang mengarah pada perubahan positif dalam masyarakat Indonesia (Leovandita, 2013).



Perilaku politik adalah kumpulan tindakan yang berkaitan dengan berbagai aspek dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam lingkup ini, interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah, serta di antara kelompok dan individu dalam masyarakat, semuanya dapat dianggap sebagai bagian dari perilaku politik. Pendekatan situasional dalam pemahaman perilaku politik menekankan pada pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan rasional, di mana etnisitas mungkin memiliki relevansi dalam satu konteks, tetapi tidak selalu relevan dalam konteks lainnya. Oleh karena itu, individu mungkin memilih untuk mengidentifikasi diri dengan kelompok etnis jika mereka melihat manfaat atau keuntungan dalam keterlibatan dalam kelompok tersebut (Sudirman, 2012).

Sebaliknya, pendekatan "primordial" berpendapat bahwa tidak diperlukan penjelasan khusus mengenai mengapa etnisitas seringkali menjadi dasar untuk diskriminasi dan mobilitasi politik. Dalam pandangan ini, kelompok etnis secara alamiah terkait dengan politik karena memiliki akar biologis atau dipengaruhi oleh budaya dan sejarah sebagai sesuatu yang diberikan dan sulit diubah dalam konteks sosial dan politik. Dengan kata lain, pandangan primordial menyatakan bahwa kategori etnis selalu memiliki hubungan dengan dimensi sosial, dan hubungan ini secara otomatis memengaruhi peran etnisitas dalam politik. Argumen utama dalam pandangan primordial adalah bahwa faktor-faktor ini tetap konsisten dalam politik etnis di berbagai konteks waktu dan geografis (Sanit, 1997).

Pengaruh identitas muncul sebagai akibat dari kebutuhan kelompok etnis, agama, bahasa, dan unsur-unsur lainnya yang merasa mendesak untuk melindungi

dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam kerangka demokrasi, nasionalisme, dan kehidupan negara. Dalam hal ini, individu atau kelompok yang terlibat dalam proses politik seringkali menemukan bahwa mereka memiliki identitas yang berbeda dari kelompok-kelompok lain. Penemuan ini membuka peluang untuk membentuk integrasi yang memungkinkan terciptanya kesetaraan tanpa menghilangkan perbedaan yang ada (Andiwilaga, 2019).

Seiring dengan itu peran integrasi dalam suatu bangsa menjadi semakin penting karena mencakup usaha untuk memasukkan identitas unik yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dalam identitas nasional secara keseluruhan. Dalam konteks ini, elemen-elemen identitas seperti etnis, agama, dan budaya tetap memiliki nilai penting dan terus dihargai serta dilestarikan tanpa menghalangi upaya untuk mencapai persatuan dalam bingkai negara yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa pengaruh identitas dalam politik bukanlah penghalang tetapi justru dapat menjadi faktor penting dalam memahami kehidupan politik yang beragam dan dinamis (Budiono, 1994: 45).

Konglomerat yang mengendalikan perekonomian memiliki sejarah panjang dalam dominasi jaringan ekonomi dan perdagangan yang dapat ditelusuri hingga masa penjajahan Belanda. Mereka telah tumbuh menjadi sebuah kelas berkuasa yang mendominasi infrastruktur ekonomi dan dikenal sebagai konglomerat. Para konglomerat ini, sebagian besar dari keturunan etnis Tionghoa, memegang peranan penting dalam menguasai mayoritas kekuatan ekonomi dari tingkat tertinggi hingga yang terendah, menciptakan pengaruh ekonomi yang sangat kuat. Dalam ranah politik rezim Orde Baru mempraktikkan sistem partai tunggal yang secara resmi

disebut Golkar (Heryanto, 2017). Meskipun ada partai politik lain seperti PPP dan PDI, dalam kenyataannya Golkar mendominasi dengan dukungan dari militer, birokrasi, dan mobilitasi massa rakyat yang seringkali terjadi di bawah tekanan dan ancaman. Situasi ini menciptakan oligarki politik di mana kekuasaan didasarkan pada mekanisme politik yang otoriter, dikuasai oleh individu tertentu dan kelompok terkait. Dengan dasar politik seperti ini, aktivitas masyarakat termasuk dalam aspek ekonomi diawasi ketat dalam kerangka otoriter yang mendominasi kehidupan masyarakat secara luas (Festianto, 2020).

Terletak di muara Sungai Rokan, Bagansiapiapi adalah sebuah kota yang terletak di pesisir utara Kabupaten Rokan Hilir, Indonesia. Salah satu karakteristik utama yang membedakan kota ini adalah keragaman etnis di antara penduduknya. Etnis Tionghoa membentuk sebagian besar dari populasi, dengan perkiraan mencapai sekitar 50 hingga 60 persen. Sementara itu, sisanya terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Melayu, Jawa, Batak. Salah satu aspek penting lainnya adalah lokasi geografis Bagansiapiapi yang sangat strategis. Kota ini berada dekat dengan Selat Malaka, sebuah jalur perdagangan internasional yang memiliki peran sentral dalam perdagangan global. Kehadiran Selat Malaka menjadikan Bagansiapiapi sebagai tempat penting dalam dinamika perdagangan antarnegara (Sanipar, 2002).

Dalam sejarahnya, Bagansiapiapi dikenal sebagai pusat produksi ikan yang signifikan. Laporan sejarah yang mencatat peristiwa pada tahun 1928, termasuk dalam surat kabar *De Indische Mercuur*, menegaskan bahwa Bagansiapiapi bahkan berada di peringkat kedua dalam daftar kota terbesar di dunia dalam hal produksi

ikan. Prestasi ini memunculkan kebanggaan dalam komunitas Bagansiapiapi dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu sentra perikanan terkemuka di dunia (Siombo, 2010). Sejarah dan komposisi etnis yang beragam, bersama dengan letak geografis yang strategis dan peran dalam industri perikanan global telah menjadikan Bagansiapiapi sebagai kota yang sangat menarik dan memiliki kedudukan yang istimewa dalam kerangka budaya, ekonomi, dan politik Indonesia.

Penelitian ini mendasarkan diri pada fenomena sejarah yang terjadi di masa lalu yang mencakup peristiwa pada tanggal 12 Maret 1946. Pada tanggal tersebut, terdapat catatan bahwa masyarakat Tionghoa di Bagansiapiapi mengibarkan bendera Kuo Min Tang secara bersamaan dengan bendera merah putih. Hal ini menarik perhatian karena tanggal 12 Maret merupakan salah satu hari libur nasional di Tiongkok, dan itulah mengapa bendera Kuo Min Tang diangkat bersamaan dengan bendera merah putih. Kejadian ini mencerminkan perpaduan antara tradisi Tionghoa dan semangat patriotisme terhadap Indonesia yang sedang memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu.

Aksi sepihak masyarakat Tionghoa tersebut menimbulkan keheranan sekaligus kemarahan para pemuda Front Rakyat Indonesia (FPRI) Bagansiapiapi. Bahkan anggota Tentara Keamanan Rakyat (SSA) marah dengan tindakan China tersebut. Masyarakat adat menilai bahwa tindakan sepihak orang Tionghoa tersebut melanggar kedaulatan pemerintahan Republik Indonesia (Laode, 2012). Kemudian terjadi baku tembak di atas kapal TNI AL yang mengangkut prajurit TNI dari front Republik menuju pelabuhan Bagansiapiapi. Kapal TNI AL berlabuh di pelabuhan Bagansiapiapi, Letnan Siahaan berpakaian perwira angkatan laut putih lengkap

dengan pedang, setelah menyiapkan senjata, anak buah Letnan Siahaan mengikuti komandannya, sesampainya di pintu pelabuhan, letnan memotong gembok sisi pelabuhan . pisau, meskipun rantainya putus, terjadi rentetan pukulan, beberapa peluru menembus tubuh letnan, tetapi tubuh letnan tidak mudah roboh, dia datang dari pelabuhan berteriak dan memerintahkan anak buahnya, kemudian tentara barbar kembali dari Cina , rentetan tembakan lagi dilancarkan oleh pasukan Tiongkok, yang menembus tubuh Letnan To Siahan. Kali ini Panglima ALRI Labuhan Biliku tumbang, seragam putihnya berubah merah dan darah bercucuran dari banyak lukanya. Pada kejadian tersebut Letnan Siahaan tewas di tempat (Rohmaini, 2013).

Kehadiran dinamika dalam ranah demokrasi lokal di Kota Bagansiapiapi, yang sebelumnya dikenal sebagai pusat bisnis perikanan dan kota dengan banyak pendatang, menghadirkan potensi konflik agama dan suku seperti yang telah disoroti sebelumnya. Hal ini juga mencerminkan dominasi simbol-simbol primordial dalam arena politik di tingkat lokal. Kemudian dari cerita peristiwa penyobekan bendera merah putih dimasa lalu di Kota Bagansiapiapi, menyebabkan etnis Tionghoa tidak berminat lagi masuk kedalam ranah politik dan mereka juga tidak berbaur dengan etnis Melayu dan Pribumi dikarenakan adanya isu sara dan etos kerja masyarakat lokal yang rendah (Festianto, 2020).

Dari perspektif keterlibatan dalam politik, para pendatang masih menghadapi serangkaian hambatan dalam upaya mereka untuk memainkan peran serta memperoleh posisi dalam struktur politik. Sejumlah posisi politik dan jabatan birokrasi masih didominasi oleh penduduk melayu, yang merupakan masyarakat

Kabupaten Rokan Hilir. Meskipun masyarakat pendatang seperti komunitas Etnis Tionghoa masih merupakan kelompok minoritas peran serta mereka dalam pertumbuhan dan perkembangan Kota Bagansiapiapi telah memberikan sumbangan yang signifikan (Hasan, 2010).

Kota Bagansiapiapi telah mengalami pertumbuhan yang pesat sejak zaman dahulu, dengan adanya interaksi antara komunitas Tionghoa dan penduduk Melayu. Komunitas Tionghoa secara khusus terlibat dalam sektor perdagangan dan bidang terkait perdagangan. Hal ini mencerminkan perkembangan sejarah Kota Bagansiapiapi. Namun, identitas Tionghoa umumnya terbatas pada sektor perdagangan dan industri rumahan yang berkaitan dengan perdagangan (Sudirman, 2012). Di sektor lainnya mereka cenderung berkumpul dalam kelompok-kelompok mereka sendiri seperti kelompok keagamaan, kelompok adat, wilayah tempat tinggal, dan lain sebagainya. Di sektor pemerintahan, angkutan, terminal, dan transportasi, kontribusi kelompok Tionghoa tidak mendominasi (Leovandita, 2013).

Orientasi politik komunitas Etnis Tionghoa di Kabupaten Rokan Hilir menciptakan dinamika dalam politik serta sirkulasi elit politik yang lebih terbuka. Dengan berkembangnya ruang demokrasi, politik identitas kembali muncul dan bersumber dari simbol-simbol keluarga, klan, kebangsawanan, dan kelompok etnis. Munculnya kelompok-kelompok etnis dan solidaritas keluarga dalam politik lokal di Kota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, merupakan hasil dari kombinasi tekanan politik sentralistik selama Orde Baru dan tekanan politik desentralisasi pasca Orde Baru. Meskipun tren ini tidak terlalu mencolok pada awal pelaksanaan

desentralisasi, seiring berjalannya waktu, menjadi semakin jelas bahwa partai politik semakin berkonsentrasi pada elitisme kekuasaan dan bergerak ke arah yang lebih pragmatis. Keberhasilan para politisi keturunan Tionghoa dalam menjadi anggota DPRD dan kepala daerah juga didukung oleh posisi pihak ini dalam struktur partai politik (Alya Parangu, 2018).

Masuknya keturunan Tionghoa ke dalam pengurus partai politik merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa berbagai aspirasi masyarakat yang mereka wakili dapat diperjuangkan secara efektif. Dalam kerangka demokrasi kontemporer, partai politik berperan sebagai alat utama untuk mengendalikan berbagai lembaga politik. Namun, keberadaan keturunan Tionghoa dalam dunia politik praktis di Kabupaten Bagansiapiapi bukanlah hasil instan; sebaliknya, itu adalah hasil dari perjalanan sejarah panjang yang berlangsung melalui beragam perkembangan dalam sektor sosial dan ekonomi. Bukti empiris yang ditemukan mengindikasikan bahwa dalam masyarakat umum, mereka memiliki kapabilitas untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung komoditas hasil pertanian dan perkebunan yang dihasilkan oleh penduduk lokal. Hubungan semacam ini pada satu sisi menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, tetapi di sisi lain juga menciptakan ketidakseimbangan, karena semakin besar ketergantungan sektor ekonomi masyarakat lokal pada komunitas Tionghoa (Laode, 2012).

Dilema yang selalu dihadapi oleh warga Tionghoa Indonesia di Kabupaten Rokan Hilir adalah tentang wujud nasionalisme dalam identitas etnis Tionghoa. Dilema ini bukan hanya menjadi perdebatan di kalangan warga non-Tionghoa, tetapi juga di antara warga Tionghoa sendiri. Pertarungan konsep asimilasi versus

integrasi sebagai solusi politik untuk mengakomodasi etnis Tionghoa dalam kerangka bangsa Indonesia masih berlanjut hingga saat ini, dan debat mengenai kedua pendekatan tersebut berlanjut dengan intensitas yang tinggi. Interaksi politik dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota terjadi pada berbagai tahapan proses tersebut. Namun, interaksi politik mencapai puncaknya saat memasuki tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, terutama dalam konteks rapat kerja antara Panitia Khusus Dewan dengan Perangkat Daerah (Festianto, 2020).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara etnisitas dan politik lokal serta peran etnis Tionghoa sebagai hasil dari perubahan politik yang dipicu oleh arus reformasi di Bagansiapiapi. Dalam konteks ini, masyarakat Tionghoa telah mengidentifikasi diri mereka dengan kuat sebagai kelompok budaya, kelompok sosial, dan individu yang aktif berpartisipasi serta mengakui hak-hak identitas mereka dalam lingkup kehidupan sebagai warga negara Indonesia yang hidup dalam bingkai negara berdasarkan asas kebangsaan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai hasilnya, penelitian ini menitikberatkan pada Orientasi Politik Etnis Tionghoa di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menilai relevan untuk merancang sebuah tesis dengan judul " Interaksi Sosial, Ekonomi dan Politik Etnis Tionghoa di Kecamatan Bangko Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir ." Tesis ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik lokal, dengan



memerhatikan dinamika kompleks dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung di wilayah tersebut. Melalui pendekatan terperinci terhadap elemen-elemen penting dan perubahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana etnis Tionghoa memengaruhi politik lokal dan sebaliknya, serta dampaknya terhadap masyarakat dan aspek politik di Kota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berbasis atas penjabaran yang telah dituliskan tersebut, maka rumusan permasalahan pada riset ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Interaksi Sosial Ekonomi dan Politik Etnis Tionghoa di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana Dinamika Sosial Ekonomi dan Politik Etnis Tionghoa di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berbasis pemamparan latar beakang diatas, maka rumusan masalah dalam riset ini ialah:

1. Untuk menganalisis bagaimana Interaksi Sosial Ekonomi dan Politik Etnis Tionghoa di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk menganalisis bagaimana Dinamika Sosial Ekonomi dan Politik Etnis Tionghoa di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pemamparan latar belakang riset yang telah dituliskan maka riset ini diharapkan mampu memberikan nilai kemanfaatan antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis dapat dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan, terutama dalam ranah linguistik dan studi bahasa. Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan yang substansial mengenai Interaksi Sosial, Ekonomi, dan Politik Etnis Tionghoa di Kota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir. Melalui penyajian data yang kaya, temuan yang mendalam, serta analisis yang komprehensif, penelitian ini menjelaskan aspek-aspek penting yang memperkaya pemahaman dalam berbagai konteks ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang linguistik dan disiplin terkait.

##### **2. Manfaat Praktis**

Bagi peneliti, informasi ini adalah subjek yang dapat dieksplorasi dalam berbagai dimensi yang berbeda, memungkinkan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan terkait pengaruh Interaksi Sosial serta Aspek Ekonomi. Bagi para pemimpin masyarakat, informasi ini memiliki relevansi penting karena bisa dijadikan sebagai sumber perbandingan yang berguna untuk meningkatkan pengaruh mereka dan dampak yang lebih besar dalam masyarakat luas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi berharga dalam memahami aspek-aspek penting dari etnisitas, politik lokal, dan

interaksi sosial ekonomi di dalam masyarakat Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Berbasis tinjauan literatur yang dirumuskan periset yaitu riset ini memiliki spesifikasi memadukan Politik Lokal dan Etnis Tionghoa dalam segi interaksi sosial, ekonomi dan politik yang bertujuan untuk menciptakan stabilisasi politik yang baik untuk negara. Penelitian yang sudah ada (Festianto, 2020) hanya membahas permodalan yang diperoleh keturunan Tionghoa dalam melaju ke kontestan pemelihan umum, (Alya Parangu, 2018) hanya membahas dalam prespektif Komunikasi Politik dalam etnis Tionghoa untuk mewujudkan kebersamaan dan persatuan etnis. Peneliti (Agus, 2014) hanya membahas dari segi peran serta etnis Tionghoa pasca Reformasi dan peneliti (Pratama, 2016)

Riset ini menggambarkan bagaimana partisipasi politik etnis Tionghoa, yang merupakan sebuah kelompok minoritas di Indonesia, tercermin melalui keterlibatan mereka dalam partai politik. Semangat etnis Tionghoa untuk berperan dalam pemerintahan Indonesia melalui partisipasi politik mereka mengalami dinamika yang menarik. Salah satu manfaat utama dari penelitian ini adalah memberikan landasan referensi yang kuat bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berhubungan dengan topik ini. Oleh karena itu, penelitian ini sangat bergantung pada kerangka penelitian yang telah ada sebelumnya. Orientasi politik etnis Tionghoa di Kabupaten Rokan Hilir menciptakan situasi di mana persaingan politik meningkat, dan sirkulasi elit politik menjadi lebih terbuka. Hal ini telah membuka

ruang demokrasi sebagai panggung untuk merevitalisasi politik identitas yang berakar pada simbolisme keluarga, klan, kebangsawanan, dan kelompok etnis.

Kehadiran kelompok-kelompok etnis, seperti paguyuban dan jaringan keluarga, dalam politik lokal di Kabupaten Bagansiapiapi, Kepulauan Riau, merupakan hasil dari kombinasi tekanan politik yang berubah dari sentralistik (terpusat) pada masa Orde Baru menjadi sentripetal (desentralisasi) pasca-Orde Baru. Meskipun pada awalnya pola ini belum terlihat secara jelas pada awal perubahan kebijakan desentralisasi, namun seiring berjalannya waktu, terlihat kecenderungan meningkatnya oligarki kekuatan partai politik, ditambah dengan arah pragmatis dalam politik partai. Kepemimpinan yang sukses oleh politisi keturunan Tionghoa dalam posisi anggota DPRD dan kepala daerah juga sangat tergantung pada posisi mereka dalam struktur partai politik yang mereka dukung. Kehadiran mereka dalam pengurus partai politik merupakan cara untuk memastikan bahwa beragam aspirasi masyarakat yang mereka wakili bisa diakomodasi, karena dalam demokrasi kontemporer, partai politik adalah instrumen utama untuk mengendalikan institusi-institusi politik.

Eksistensi keturunan Tionghoa dalam dunia politik praktis di Kabupaten Bagansiapiapi tidak terwujud secara instan, melainkan melalui proses turun-temurun yang melibatkan sektor sosial dan ekonomi. Dalam pandangan sebagian besar masyarakat pribumi, stereotip berkembang bahwa etnis Tionghoa memiliki peran dominan dalam sektor ekonomi (Sudirman, 2012). Etnis Tionghoa sering dipandang sebagai kelompok dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi dan sebagai kelompok yang terisolasi dari penduduk pribumi. Hal ini seringkali menimbulkan

rasa cemburu di kalangan pengusaha pribumi. Akibatnya, beberapa pemimpin pribumi telah mencoba mengusulkan pembatasan terhadap aktivitas ekonomi etnis Tionghoa.

Keadaan ini mencerminkan dinamika sosio-ekonomi yang kompleks di Indonesia, di mana ketidaksetaraan ekonomi dan isu-isu etnis seringkali saling terkait. Ketidaksetaraan ekonomi dapat memicu perasaan ketidakpuasan di kalangan masyarakat pribumi, terutama jika mereka merasa bahwa etnis Tionghoa mendominasi sektor ekonomi tertentu. Namun, langkah-langkah pembatasan seperti ini sering kali menjadi perdebatan yang kompleks karena melibatkan pertimbangan etnis, politik, dan ekonomi yang rumit (Laode, 2012).

Pemerintah telah mengambil tindakan tegas dengan melarang etnis Tionghoa terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pada ranah agama, budaya, dan tradisi, pemerintah mengamati bahwa semua elemen ini mengandung elemen budaya yang erat terkait dengan akar budaya Indonesia. Orang-orang etnis Tionghoa sering dilihat sebagai kelompok yang hidup terpencil dalam kelompok-kelompok sendiri, menjauh dari komunitas pribumi yang lebih besar. cenderung bermukim di kawasan-kawasan elit yang terkadang hanya dihuni oleh sesama etnis Tionghoa. Sebaliknya, jika tinggal bersama dengan masyarakat pribumi, sering dianggap sebagai individu yang menjaga jarak dan tidak berpartisipasi dalam aktivitas sosial yang lebih luas.

Keadaan ini sebagian besar dipengaruhi oleh praktik politik yang diterapkan oleh kolonial Belanda. Hal ini telah menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi sekitarnya, yang

berkontribusi pada perasaan keterasingan yang semakin mendalam. Faktor sejarah memainkan peran penting dalam menentukan peran etnis Tionghoa dalam kerangka sosial dan politik Indonesia. Keterlibatan tidak dimulai baru-baru ini, melainkan telah ada sejak masa perdagangan rempah-rempah di kepulauan Nusantara. Komunitas Tionghoa sudah berdiam di wilayah pesisir yang meliputi Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku sebelum Belanda merambah ke wilayah Nusantara. Bahkan, sering diakui dan diangkat oleh penguasa-penguasa lokal sebagai perantara dalam perdagangan, dengan tujuan untuk mencegah potensi konflik antara penguasa lokal dan menghindari persaingan di dalam perdagangan komoditas nusantara.

Dalam menghadapi tekanan dari pihak kolonial dan pengaruh global yang terus berkembang, komunitas etnis Tionghoa terdorong untuk memusatkan perhatian terutama pada sektor ekonomi. Hal ini kemudian membentuk orientasi politik etnis Tionghoa, yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menjalankan interaksi sosial dan ekonomi di dalam lingkungan yang huni (Nawir, 2019). Masyarakat etnis Tionghoa aktif terlibat dalam proses politik dengan berpartisipasi pada beragam momen yang memiliki ciri khasnya sendiri. Di tengah dinamika ini, tercipta relasi saling memengaruhi antara dimensi politik dan identitas etnis. Kesadaran akan identitas etnis tersebut pun tercermin dalam ranah politik, baik dalam bentuk kesadaran yang dimiliki oleh individu-individu sebagai bagian dari etnis Tionghoa, maupun dalam bentuk kesadaran yang diadopsi oleh kelompok etnis secara kolektif.

Sebaliknya, masyarakat pemilih yang terbagi berdasarkan latar belakang etnisnya sering kali memilih untuk menilai para kandidat politik dengan mempertimbangkan aspek etnisitas dalam pengambilan keputusan mereka. Dukungan politik pun seringkali diberikan berdasarkan pertimbangan ini, menciptakan pola pemilihan yang kompleks dan berlapis. Untuk memahami lebih dalam mengenai budaya dan nilai-nilai yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari dari suatu kelompok masyarakat, penting untuk mengawali analisis dengan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek psikologi individu-individu yang membentuk komunitas tersebut. Di samping itu, perlu diperhatikan juga konteks sosial yang melingkupi mereka, yang menjadi faktor penentu karakteristik pribadi dan karakteristik sosial dari kelompok individu yang terkait (Sofyan, 2014: 71).

Minat yang semakin meningkat di kalangan masyarakat etnis Tionghoa untuk terlibat dalam proses pemilihan dan bahkan terjun langsung ke dalam dunia politik dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah perbaikan kondisi politik dan pemerintahan Republik Indonesia yang terlihat seiring dengan berjalannya era reformasi di negara ini. Era reformasi telah membawa perubahan positif dalam sistem politik Indonesia, mendorong minat lebih banyak orang untuk terlibat dalam proses politik. Selain itu, kesadaran kebangsaan masyarakat Indonesia secara keseluruhan juga semakin berkembang, terutama dalam hal memahami keragaman etnik dan budaya yang ada di negeri ini.

Ini mendorong masyarakat etnis Tionghoa untuk lebih aktif dalam politik, karena mereka merasa semakin terhubung dengan Indonesia sebagai bangsa yang

beragam. Munculnya rasa percaya diri di kalangan masyarakat etnis Tionghoa juga berperan penting. Generasi muda dalam komunitas ini berupaya untuk bangkit dari bayang-bayang masa lalu yang kelam dan penuh trauma. Mereka ingin hidup sejajar dengan warga pribumi lainnya dan berkontribusi pada pembangunan negara. Akibatnya, etnis Tionghoa tidak lagi menilai kandidat politik berdasarkan warna kulit atau asal etnis, melainkan lebih fokus pada kualitas dan kredibilitas seseorang dalam masyarakat. Ini mencerminkan perubahan positif dalam persepsi dan partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia (Muhadam, 2007: 32).

## **1.6 Kerangka Teori**

Pada penelitian ini menggunakan kerangka teori yang terdiri dari beberapa konsep dasar yaitu 1) Teori Etnisitas, 2) Teori Interaksi Sosial 3) Demokrasi Politik Etnis Tionghoa dan 4) Interaksi Sosial, Ekonomi dan Politik

### **1.6.1 Teori Etnisitas Politik Lokal**

Etnisitas pada dasarnya bukan sesuatu yang muncul secara instan, tetapi itu adalah hasil dari proses yang berlangsung secara bertahap. Etnisitas berkembang sebagai kesadaran yang tumbuh dalam diri individu atau kelompok, yang kemudian memisahkan mereka dari kelompok lain. Inti dari eksistensi etnisitas adalah kesamaan dan kemiripan yang ada dalam berbagai aspek kebudayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok. Ini mencakup persamaan dalam struktur sosial, bahasa, upacara adat, keturunan, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya. Meskipun ciri-ciri kesamaan ini memiliki peran yang penting dalam menentukan identitas



etnis, dalam kehidupan sehari-hari seringkali cenderung tidak begitu dianggap istimewa atau menonjol (Nawir, 2019).

Peran etnisitas dalam strategi politik untuk membedakan antara kelompok "kita" dan "mereka" adalah aspek yang patut diperhatikan. Etnisitas sendiri merupakan konsep yang kompleks dan memiliki tiga dimensi yang berbeda, yaitu dimensi horizontal, vertikal, dan intensitas. Dalam dimensi horizontal, etnisitas dapat digunakan sebagai alat strategis untuk mencapai keuntungan politik dan ekonomi, serta berfungsi sebagai pembatas sosial yang membedakan kelompok etnis. Selain itu, etnisitas juga dapat menjadi sumber kreativitas budaya yang menghormati keragaman. Dalam dimensi horizontal ini, tidak ada hierarki antar etnis atau pandangan merendahkan terhadap etnis lainnya. Etnisitas, dalam konteks ini, berperan sebagai sarana untuk melegitimasi tuntutan sumber daya yang semakin terbatas atau untuk memperkuat posisi dalam persaingan dengan individu lain.

Sementara dalam dimensi vertikal, etnisitas seringkali terkait dengan label negatif seperti inferioritas, keterbelakangan, dan ketertutupan. Kemudian, dalam dimensi intensitas, terdapat kompleksitas dalam hubungan antara kepentingan nasional yang bersifat sentralistik dan etnik yang bersifat regionalistik. Intensitas ini dapat menghasilkan dua bentuk yang berlawanan: konflik antar etnis dan keragaman kultural. Dampak dari penguatan identitas etnis memiliki dua implikasi utama. Pertama, individu atau kelompok mungkin memilih untuk menjauh dari struktur negara bangsa

atau bahkan mencoba memisahkan diri darinya. Kedua, mereka mungkin berupaya untuk memperkuat kedudukan etnis mereka dalam pemerintahan negara bangsa. Dalam konteks sehari-hari, hal ini tercermin dalam preferensi pejabat pemerintahan yang cenderung lebih suka melibatkan individu yang memiliki latar belakang etnis atau regional yang serupa.

Etnisitas tetap menjadi fokus perdebatan yang signifikan dalam konteks identitas ke-Indonesiaan. Sejarah panjang Nusantara telah membentuk keragaman budaya dan etnik di bawah payung persatuan yang dicanangkan oleh pemerintah. Konsep Nusantara mencerminkan cara etnisitas dapat berperan sebagai penanda penting dalam mewujudkan pluralitas, namun juga berada dalam ranah integrasi dan kekuasaan yang kompleks (Sofyan, 2014).

Meskipun tingkat politik lokal seringkali dianggap sebagai lapisan yang paling dasar dalam hierarki politik, kenyataannya, sebagian besar isu politik, baik yang berskala global maupun nasional, menemukan akarnya dalam dinamika lokal. Isu-isu serta pelaku politik pertama-tama muncul dan tumbuh di tingkat komunitas lokal sebelum mereka menjalar dan menjadi perhatian yang lebih luas, mencapai ranah nasional, bahkan merambah hingga ke sorotan global. Ini mengingatkan kita pada keterkaitan erat antara politik lokal, nasional, dan internasional. Contohnya, isu diskriminasi politik yang berasal dari pertentangan suku, agama, ras, dan etnisitas (SARA) pada dasarnya bermula sebagai konflik yang bersifat lokal, berkembang di suatu daerah tertentu. Akan tetapi, seiring berjalannya

waktu, isu tersebut mampu menarik perhatian di tingkat nasional dan, akhirnya, menerima respons yang meluas di tingkat global. Hal ini menegaskan bahwa bahkan isu-isu yang tampaknya sederhana pada level lokal memiliki potensi untuk merambah hingga ke tingkat dunia, mengingat kerumitan hubungan dan saling ketergantungan yang menjadi ciri khas politik global saat ini (Budiono, 1994: 92).

Tidak kalah pentingnya, pelaku politik yang bermula dari ranah lokal seringkali mampu menanjak ke tingkat nasional atau bahkan internasional berkat keberanian dan kemampuannya dalam melawan tirani dan diskriminasi. Dinamika ini mencerminkan kerumitan politik di tingkat lokal yang kadang-kadang mengganggu prinsip-prinsip good governance. Pergeseran praktik penyalahgunaan kekuasaan, sering kali dalam bentuk korupsi, dari pusat ke daerah, ditandai dengan meningkatnya jumlah kepala daerah dan anggota DPRD yang tersandung dalam masalah hukum, menjadi salah satu ciri khas era Reformasi yang sedang berlangsung.

Selain itu, tren yang semakin kuat dan merata terkait dengan dominasi tokoh-tokoh kuat di tingkat lokal menciptakan situasi di mana "kekuasaan" sering dijadikan sebagai tujuan utama, alih-alih hanya sebagai alat untuk mencapai hasil yang lebih besar atau melayani masyarakat. Konsekuensinya, kita menyaksikan banyak tokoh di luar struktur pemerintahan yang terjebak dalam pusaran kekuasaan yang sesaat, dan terkadang, hal ini berdampak negatif pada masyarakat yang mereka layani.

Perkembangan otonomi daerah yang terus berlanjut memberikan peluang besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan, terutama dalam menyelesaikan masalah yang secara langsung memengaruhi mereka. Prinsip-prinsip otonomi daerah yang berkembang memberikan ruang yang lebih luas dan sarana yang lebih komprehensif bagi peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, perkembangan demokrasi, harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Semua ini adalah indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pemerintahan daerah secara menyeluruh (Yudono, 2018).

Efektivitas pemerintahan daerah adalah hasil dari perkembangan sistem politik yang terjadi di lingkungan lokal, yang secara keseluruhan diintegrasikan ke dalam kerangka sistem politik nasional yang berfungsi dengan baik. Selama periode revolusi, terbukalah pintu regulasi-regulasi yang menciptakan kerangka kerja yang mendukung dan memajukan praktek-praktek demokrasi. Salah satu bukti konkrit dari evolusi ini adalah pengenalan sistem pemilihan langsung kepala daerah, yang sejalan dengan semangat partisipasi rakyat dalam proses demokrasi. Otonomi daerah membawa dampak yang signifikan, yaitu melibatkan masyarakat dalam ranah politik dan mengurangi dominasi institusi politik yang mungkin sebelumnya cenderung otoriter.

Mengingat perubahan-perubahan ini, institusi politik harus memosisikan diri untuk menjadi agen yang mampu memenangkan

kepercayaan masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan, baik dalam arti fisik maupun spiritual. Dalam konteks ini, pentingnya peran pemerintah menjadi sangat terlihat dalam memahami dan memenuhi aspirasi serta kebutuhan masyarakat, sambil menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.

### **1.6.2 Teori Interaksi Sosial**

Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Adapun Basrowi (20015) mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerjasama, tetapi juga berbentuk tindakan, persaingan, pertikaian dan sejenisnya.

Interaksi sosial mengacu pada dinamika kompleks dalam relasi-relasi sosial yang terus berubah dan berkembang seiring waktu. Relasi sosial tersebut mencakup berbagai jenis hubungan, baik antara individu dengan individu lainnya, antara kelompok dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Dalam setiap bentuk interaksi ini, simbol memiliki peran kunci, yang dapat dijelaskan sebagai elemen-elemen yang mendapatkan nilai dan makna melalui penggunaan dan penafsiran yang individu-individu dalam masyarakat berikan.

Sebuah konsep yang diajukan oleh Herbert Blumer, seorang sosiolog terkemuka, adalah proses interaksi sosial yang mencakup tindakan individu berdasarkan makna yang diberikan kepada objek atau situasi tertentu. Penting untuk diingat bahwa makna ini sering kali berasal dari interaksi yang berlangsung antara individu dan anggota masyarakat lainnya. Yang menarik adalah bahwa makna tersebut tidak bersifat konstan, melainkan cenderung berubah seiring dengan waktu dan pengalaman individu. Perubahan dalam makna ini seringkali terjadi melalui proses interpretasi yang dilakukan oleh individu ketika mereka berhadapan dengan objek atau situasi tertentu. Proses interpretatif ini adalah cara individu menghubungkan makna dengan pengalaman mereka sehari-hari, mencerminkan dinamika kompleks dalam interaksi sosial (Sanipar, 2002).

Dalam dinamika interaksi sosial, komunikasi memegang peran yang sangat vital. Komunikasi berperan sebagai medium yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan perasaan, pemikiran, atau niat kepada orang lain melalui beragam bentuk ekspresi, seperti percakapan, gerakan tubuh, dan sikap. Pada tahap selanjutnya, individu yang menerima pesan tersebut meresponsnya dengan cara yang sesuai, yang dapat berupa pemahaman, tanggapan, atau tindakan. Perlu diingat bahwa dalam proses komunikasi, seringkali terdapat peluang bagi berbagai penafsiran terhadap perilaku dan pesan yang disampaikan oleh individu. Sebagai contoh, senyuman seseorang bisa memiliki interpretasi yang beragam, seperti

tindakan ramah, ekspresi bersahabat, atau bahkan sebagai tanda sinis atau upaya untuk menunjukkan dominasi.

Dengan kata lain, komunikasi memfasilitasi kerja sama dan interaksi antarindividu dan kelompok. Tetapi sebaliknya, komunikasi juga dapat menjadi sumber konflik ketika terjadi ketidaksepahaman yang tidak terselesaikan, di mana setiap pihak enggan untuk memahami sudut pandang yang berbeda. Komunikasi juga berperan dalam memungkinkan kelompok atau individu untuk memahami sikap dan perasaan yang dimiliki oleh kelompok atau individu lain. Pengetahuan ini kemudian menjadi dasar bagi mereka untuk menentukan reaksi yang tepat dalam konteks interaksi sosial, termasuk keputusan apa yang harus diambil dan tindakan apa yang harus diambil selanjutnya (Saputro, 2011).

Dalam fenomena lapangan, Banyak interaksi terjadi ketika berbicara politik terkhusus mahasiswa yang sedang menggebu-gebu membahas politik di sosial media, fasilitas umum, forum sosial. Tidak sedikit pula mereka saling menggunakan kata kata yang baku dan informatif, juga ada yang menggunakan kata spontanitas dan terkesan kasar. Mediasi media juga seolah membuat mahasiswa harus berpikir keras dengan halhal terjadi di dunia politik, harus bercondong kemana dan siapa tergantung kebutuhan, dituntut harus berwawasan bahasa dan mengenal nilai dari suatu bahasa dan etika sebagai komunikator sebagai narator politik.

### **1.6.3 Demokrasi Politik Etnis Tionghoa**

Pada dasarnya, suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat. Permufakatan yang dicapai melalui "engineering", manipulasi atau merupakan permufakatan yang curang, cacat atau sakit, malah dapat disebut sebagai penghianatan pada nilai dan semangat musyawarah. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok yang bersangkutan memiliki kesediaan psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik, dan beriktikad baik.

Peranan etnis Tionghoa dalam perkembangan sejarah Indonesia, terutama dari masa penjajahan hingga era orde lama, mencerminkan kesadaran politik yang tumbuh di kalangan kelompok minoritas ini. Meskipun partai-partai yang dirikan pada saat itu masih sangat menekankan pada kepentingan etnis dan anggotanya sebagian besar berasal dari kalangan etnis Tionghoa, periode ini sangat dipengaruhi oleh isu-isu kewarganegaraan dan pengalaman diskriminasi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa etnis Tionghoa pada masa itu masih mempertahankan identitas budaya dan belum sepenuhnya terintegrasikan dalam masyarakat luas Indonesia. Pada era Orde Baru, peran serta etnis Tionghoa dalam politik nyaris mati karena tindakan diskriminatif yang diadakan oleh pemerintah. Namun, sejak dimulainya era Reformasi, partisipasi dalam politik semakin



nyata dan mengalami perkembangan yang signifikan, terutama selama pemilihan umum pada tahun 1999, 2004, dan 2009.

Sejarah keterlibatan etnis Tionghoa dalam partai politik di Indonesia, dari masa penjajahan hingga era Reformasi, mencerminkan dinamika sosial yang selalu berubah sesuai dengan konteks politik yang berlaku. Pada setiap periode waktu tersebut, sistem politik yang berkuasa memiliki karakteristik yang berbeda. Interaksi dan ketergantungan etnis Tionghoa dalam partai politik, sebagai bagian dari keragaman bangsa Indonesia, selalu terkait dengan sistem pemerintahan yang berlaku dan situasi sosial yang ada pada saat itu.

Perlu dicatat bahwa etnis Tionghoa telah memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia jauh sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Sejak didirikannya Partai Tionghoa Indonesia, beberapa tokoh etnis Tionghoa, seperti Kho Sien Hoo, telah aktif dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Negara Indonesia terbentuk, etnis Tionghoa yang menjadi warganegara Indonesia secara otomatis diakui sebagai salah satu kelompok etnis yang mendiami Indonesia, setara dengan kelompok etnis lainnya. Sistem kepercayaan dan budaya juga memegang peran penting dalam membentuk budaya dan kehidupan masyarakat. Etnis Tionghoa menganut berbagai kepercayaan, termasuk Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme, dengan Konfusianisme menjadi ajaran yang paling dominan. Konfusianisme mengajarkan tentang moralitas dan etika yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu, dan prinsip-prinsip ini digunakan

oleh Konfusius untuk mengatur hubungan sosial dan moral dalam masyarakat (Satya, 2013).

Minat partisipasi masyarakat etnis Tionghoa dalam pemilihan umum dan terlibat dalam dunia politik dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang signifikan. Salah satu faktor penting adalah kondisi politik dan pemerintahan Republik Indonesia yang mengalami perbaikan yang signifikan sejak dimulainya era reformasi. Reformasi ini telah membawa perubahan positif dalam sistem politik, memberikan harapan baru, dan mendorong partisipasi politik lebih aktif dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk etnis Tionghoa.

Peningkatan pemahaman warga Indonesia tentang kehidupan dalam masyarakat multietnik dan multikultural juga berperan penting dalam memotivasi partisipasi politik etnis Tionghoa. Kesadaran ini telah menggeser penilaian mereka terhadap kandidat-kandidat politik, tidak lagi hanya berdasarkan aspek etnis atau warna kulit, tetapi lebih menekankan pada kualitas individu dan kredibilitasnya dalam masyarakat. Ini mencerminkan perkembangan positif dalam masyarakat yang semakin menghargai beragam aspek dalam menilai para pemimpin politik.

Selain itu, munculnya rasa percaya diri di kalangan masyarakat etnis Tionghoa juga menjadi faktor penting. Mereka telah berhasil mengatasi trauma sejarah yang kelam dan menyakitkan, terutama generasi muda dalam komunitas etnis Tionghoa. Mereka memiliki tekad untuk bangkit, hidup setara dengan warga pribumi, dan memainkan peran aktif dalam

membangun masa depan yang lebih baik. Semua faktor ini, bersama-sama, telah memotivasi dan memperkuat partisipasi politik etnis Tionghoa dalam konteks Indonesia yang semakin inklusif dan beragam.

#### **1.6.4 Interaksi Sosial, Ekonomi dan Politik**

Kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari secara alamiah melibatkan proses interaksi. Interaksi ini dapat berlangsung antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, atau bahkan antara kelompok dengan kelompok. Manusia memiliki beragam faktor yang mendorongnya untuk berinteraksi, termasuk kebutuhan internal seperti kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, dan kebutuhan integratif. Selain itu, manusia secara alamiah memiliki dorongan untuk hidup dalam kelompok atau bersama dengan orang lain. Komunikasi adalah salah satu wujud interaksi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk individu secara pribadi, kelompok, maupun dalam konteks lembaga atau organisasi. Komunikasi adalah sarana untuk berbagi informasi, ide, dan perasaan, serta untuk mencapai pemahaman dan kerjasama antarindividu atau kelompok. Dengan demikian, komunikasi adalah elemen kunci dalam menjalankan interaksi dan kehidupan sosial manusia (Grahani Firdausy, 2013).

Dalam upaya menjaga koordinasi yang lancar di lembaga tertentu, interaksi memiliki peran utama. Interaksi, sebagai elemen dinamis dalam hubungan sosial, terjadi baik antara individu dengan individu lainnya maupun antara kelompok dan individu. Dalam konteks pengelolaan

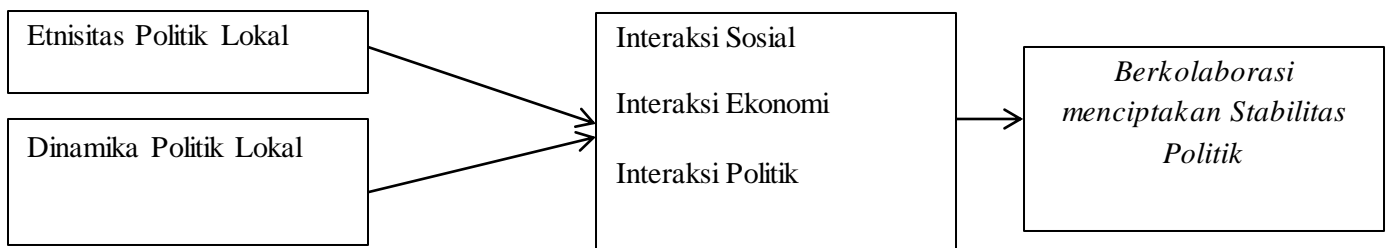
lembaga pemerintahan, interaksi menjadi unsur penting yang membentuk dinamika dalam menjalankan fungsi lembaga tersebut. Interaksi politik, sebagaimana dijelaskan oleh para pakar, merujuk pada relasi yang dinamis yang terjadi antara individu-individu dan kelompok-kelompok dalam ranah politik. Interaksi politik memainkan peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari serta dalam operasi lembaga-lembaga pemerintahan.

Sementara dalam ranah ekonomi, terdapat tiga aspek utama yang sering dikenali, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Ketiga aspek ini adalah bagian integral dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Ilmu ekonomi, sebagai disiplin ilmu, memfokuskan pada bagaimana masyarakat memproduksi barang dan jasa serta cara mendistribusikannya kepada anggota masyarakat lain untuk memenuhi kebutuhan. Dalam ilmu ekonomi, terdapat dua asumsi penting, yakni asumsi tentang kelangkaan sumber daya (*scarcity of resources*) dan implikasinya yang mencakup asumsi penggunaan sumber daya secara efektif (Sanipar, 2002).

Dalam perspektif dinamika interaksi politik, partisipasi seseorang dalam dunia politik dapat terwujud terlepas dari asal usul sosial mereka atau tingkat kekayaan yang dimiliki. Oleh karena itu, tingkat pendapatan sering dijadikan tolok ukur untuk mengukur tingkat kemajuan suatu wilayah, di mana wilayah dengan pendapatan rendah cenderung memiliki tingkat kesejahteraan dan perkembangan yang terbatas, sementara wilayah dengan pendapatan tinggi seringkali mengalami kemajuan dan kesejahteraan yang

lebih baik. Pendapatan juga mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Saat pendapatan meningkat, masyarakat cenderung meningkatkan tingkat pengeluaran mereka. Namun, apakah seseorang memiliki tingkat pengeluaran yang tinggi atau rendah seringkali bergantung pada kemampuan mereka untuk mengelola pendapatan mereka dengan baik. Oleh karena itu, individu harus mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka dan secara cerdas memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini pada akhirnya akan memberikan akses yang lebih besar dalam interaksi politik di masyarakat (Soemantri, 1993: 54).

### 1.7 Kerangka Berfikir/Pemikiran



**Gambar 1.1 Kerangka Berfikir**

### 1.8 Definisi Konseptual dan Definisi Oprasional

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep utama yang digunakan, yaitu :

#### a. Etnisitas Politik Lokal

Etnisitas merupakan suatu proses kesadaran yang berkembang, yang pada akhirnya mengidentifikasi kelompok. Dasar dari etnisitas ini terdiri dari sejumlah persamaan dan kesamaan dalam beragam aspek budaya, seperti

struktur sosial, bahasa, upacara adat, keturunan, dan lain sebagainya. Sebagian besar ciri persamaan ini, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak memainkan peran yang signifikan. Akan tetapi, dalam situasi-situasi tertentu, kesadaran etnis ini dapat menguat dan menjadi lebih menonjol. Hal ini terjadi karena etnisitas bisa menjadi dasar dan ideologi yang mempersatukan individu-individu. Dari etnisitas ini, seseorang dapat mengembangkan pandangan dunia, alat sosial yang membentuk perilaku mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada tahap ini, etnisitas yang mengandung identitas yang kuat dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang memiliki elemen politik.

#### **b. Dinamika Politik Lokal**

Perkembangan politik lokal yang melibatkan partisipasi rakyat melalui Pemilu Lokal dan Partai Politik Lokal memiliki peran penting dalam menentukan perwakilan mereka di lembaga legislatif, baik di tingkat lokal maupun nasional. Terlepas dari posisi politik lokal yang tergolong pada tingkat yang paling dasar dalam sistem politik, penting untuk diingat bahwa semua isu politik, termasuk yang berskala global atau nasional, memiliki akar yang berawal dari lingkup lokal. Isu-isu politik dan aktor politik pertama kali muncul dan berkembang di tingkat lokal sebelum menyebar menjadi isu yang lebih luas dan menjadi sorotan nasional bahkan global. Sebagai contoh, isu-isu terkait diskriminasi berbasis SARA awalnya timbul dari masalah yang terjadi di tingkat lokal atau daerah sebelum kemudian

menjadi isu yang mendapat perhatian di tingkat nasional dan bahkan internasional.

### **c. Interaksi Sosial**

Gilin (2002) mendefinisikan interaksi sosial sebagai relasi dinamis antara individu-individu atau antara individu dengan kelompok. Hubungan ini muncul karena manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan orang lain. Dalam interaksi sosial, komunikasi memegang peran penting dan harus ada baik dalam interaksi individu-individu maupun antara kelompok. Ini berlaku tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam konteks ekonomi dan politik.

Dimensi Interaksi sosial menurut (Gilin, 2002) yaitu asosiatif dan disosiatif. Menurut Gillin terdapat dua jenis proses sosial yang muncul akibat adanya interaksi sosial, yaitu proses yang mengarah pada terwujudnya persatuan dan integrasi sosial (asosiatif) dan proses oposisi yang berarti cara berjuang untuk melawan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu (disosiatif). Di antara kedua proses sosial tersebut, asosiatif merupakan bentuk interaksi yang akan mendorong terciptanya keteraturan sosial.

Contoh interaksi sosial dalam bidang ekonomi dan politik dapat dengan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Di pasar atau mal, kita sering melihat interaksi sosial dalam konteks ekonomi, seperti dalam proses jual-beli antara penjual dan pembeli. Di sisi lain, contoh interaksi sosial dalam politik sering muncul menjelang pemilihan umum (pemilu), di mana

individu dan kelompok berinteraksi dalam proses pemilihan pemimpin. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan hubungan dengan pihak lain dalam menjalani kehidupan mereka, dan interaksi sosial adalah cara di mana hubungan ini terbentuk.

#### **d. Interaksi Ekonomi**

Individu memiliki hubungan antara satu sama lain, kelompok manusia memiliki interaksi, dan bahkan negara-negara menjalin hubungan dalam rangka membentuk suatu sistem. Dalam konteks ini, manusia hidup dalam kelompok yang membentuk sistem sosial. Dalam sistem ini, masyarakat memproduksi berbagai barang atau komoditas dan mendistribusikannya kepada anggota masyarakat lain guna memenuhi berbagai kebutuhan. Ilmu ekonomi mengkaji proses ini. Manusia menjalin hubungan satu sama lain, baik dalam skala individu, kelompok manusia, maupun antara negara-negara yang berkontribusi dalam membentuk sistem sosial yang kompleks. Dalam kerangka sistem sosial ini, masyarakat bekerja sama dalam proses produksi dan distribusi berbagai barang dan jasa untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang beragam. Ilmu ekonomi merinci dan menganalisis proses-proses ini, menyelidiki bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan dalam konteks kebutuhan yang tak terbatas. Ilmu ekonomi berpegang pada dua asumsi sentral, pertama, asumsi kelangkaan sumber daya yang menekankan bahwa sumber daya yang tersedia adalah terbatas. Kedua, asumsi ini berdampak pada perlunya pengelolaan yang efisien untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.



#### **e. Interaksi Politik**

Interaksi dalam konteks politik adalah hasil dari dinamika yang melibatkan beragam kelompok dan individu dengan berbagai kepentingan, yang tak terpisahkan dari fungsi dan keberlangsungan negara. Para pemegang kekuasaan, termasuk anggota pemerintahan dan partai politik, menjadikan kepentingan ini sebagai landasan dalam mengatur negara. Di dalam ranah kepentingan politik, juga terdapat aspek penting seperti keamanan dan pertahanan negara. Namun, ketika mengamati interaksi dalam politik dan dalam pembentukan regulasi daerah, tampak adanya kecenderungan yang lebih mengedepankan elitisme. Fenomena ini muncul sebagai bagian dari kerangka kerja politik demokratis yang, dalam beberapa situasi, lebih melibatkan elit dalam proses legislasi.

### **1.9 Metode Riset**

#### **1.9.1 Tipe dan Ruang Lingkup Riset**

Pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini mendasarkan diri pada penggunaan ukuran-ukuran kualitatif yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Pendekatan ini tidak mengandalkan perhitungan matematis atau statistik dalam pengolahan data. Sebaliknya, fokus utamanya adalah pada pemahaman mendalam terhadap data, mulai dari tahap reduksi, penyajian, verifikasi, hingga penarikan kesimpulan. Dalam konteks ini, data dianalisis dengan lebih mendalam dan kontekstual. Hal ini berarti bahwa peneliti

tidak hanya mempertimbangkan angka atau statistik, tetapi juga mencoba memahami makna di balik data tersebut.

Pendekatan kualitatif memberikan kebebasan bagi peneliti untuk menjelajahi detail-detail yang mungkin tidak dapat tertangkap dalam analisis kuantitatif. Ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan konteks dan dampak dari data yang ditemukan. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dalam riset ini mengedepankan analisis mendalam, pengertian, dan interpretasi data sebagai sarana untuk menggali pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini menjadi landasan bagi pengembangan makalah ini dengan menekankan pada aspek-aspek yang lebih substansial daripada perhitungan statistik atau data berbasis angka (Moleong, 2004:43).

Riset kualitatif dapat dikonsepsikan sebagai suatu proses eksplorasi yang didasarkan pada beragam tradisi metodologis riset. Tujuannya adalah untuk meraih pemahaman yang mendalam mengenai masalah sosial atau manusia. Dalam kerangka riset kualitatif, peneliti berupaya membentuk pandangan yang bersifat kompleks dan holistik, menganalisis makna dalam kata-kata, mendokumentasikan pandangan yang terperinci dari narasumber, dan menjalankan riset dalam konteks lingkungan alami (Creswell, 2010).

Riset ini memandang pendekatan studi kasus sebagai metode inti yang diadopsi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi

dengan teliti suatu permasalahan yang telah ditetapkan, dengan mengikuti pedoman pengumpulan data yang telah didefinisikan sebelumnya. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dalam riset ini bertujuan untuk meraih pemahaman yang mendalam dan obyektif tentang fokus riset. Pemilihan pendekatan studi kasus dilakukan berdasarkan kenyataan bahwa permasalahan yang menjadi fokus riset terbatas pada lokasi tertentu, yakni Kota Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir.

Riset lapangan yang menerapkan pendekatan kualitatif melibatkan peneliti dalam proses observasi langsung di Kota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, wawancara tatap muka digunakan sebagai metode utama untuk berinteraksi dengan politisi lokal dan anggota komunitas etnis Tionghoa yang bermukim di wilayah tersebut. Politisi yang menjadi subjek riset ini adalah tokoh yang memiliki pengaruh dan daya tarik kuat di Kota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, serta memiliki kapasitas untuk memengaruhi berbagai lapisan masyarakat dalam upaya menciptakan stabilitas politik.

### **1.9.2 Jenis dan Sumber Data**

Sumber serta jenis data pada riset ini antara lain adalah sebagai berikut:

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer pada riset ini diambil melalui wawancara terhadap pihak terkait yaitu:

1. Afrizal Sintong selaku Bupati Kabupaten Rokan Hilir.
2. Jufrihan selaku ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Rokan Hilir.

3. Rendi Gunawan (Kho Peng) selaku Multi Marga (Tionghoa) Bagansiapiapi.
4. Rio Almista selaku Ketua Lembaga Bagansiapiapi Tempo Doeloe
5. Tiga orang masyarakat Melayu lokal dan Tionghoa

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder pada riset ini mencakup sumber analisis buku maupun jurnal yang berkorelasi kuat dengan data – data yang diperlukan pada riset ini guna menguatkan data primer riset.

#### **1.9.3 Informan Penelitian**

Riset ini mempergunakan instrumen riset berupa hasil jawaban wawancara, maka akan dihasilkan informasi secara mendalam dengan cara *face to face* atau wawancara saling berhadap-hadapan atau empat mata dengan informan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka sengaja dirancang untuk menghasilkan berbagai pandangan dari para informan.

Informan riset di pilih sesuai dengan tujuan riset yaitu dengan purposive sampling yang bertujuan untuk menemukan orang yang memahami dan memiliki akses terkait informasi obyek riset ini. Pihak yang menjadi pemberi informasi pada riset ini antara lain:

### 1. Pemerintah

Pada riset ini pihak periset akan mencoba mencari informasi konkrit melalui perantara Bupati Kabupaten Rokan Hilir yaitu Afrizal Sintong dalam wawancara ini periset akan menggali mengenai fenomena adanya demokrasi politik lokal.

### 2. Lembaga Adat Melayu (LAM)

Dalam riset ini periset akan menggali informasi dari ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) yang diwakilkan Jufrihan dalam wawancara ini periset akan menggali peran lembaga adat melayu dalam stabilisasi demokrasi politik etnis melayu yang ada dalam Kabupaten Rokan Hilir.

### 3. Lembaga Adat Tionghoa (LAT)

Riset ini mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Tionghoa (LAT) yang diwakili oleh Rendi Gunawan (Kho Peng). Fokus wawancara adalah untuk mengeksplorasi peran dan keberlanjutan keterlibatan keturunan Tionghoa dalam dunia politik praktis di Kabupaten Bagansiapiapi. Keterlibatan ini telah menjadi bagian integral dalam struktur sosial dan ekonomi komunitas selama beberapa generasi. Dalam masyarakat pribumi, sering muncul stereotip bahwa etnis Tionghoa mendominasi sektor ekonomi dan dipandang sebagai kelompok yang memiliki tingkat ekonomi lebih tinggi serta dianggap terpisah dari masyarakat pribumi.

### 4. Lembaga Bagansiapiapi Tempo Doeloe

Ketua Lembaga Bagansiapiapi Tempo Doeloe, yang diwakili oleh Rio Almista. Melalui wawancara ini, periset bertujuan untuk mengungkapkan dinamika yang muncul dalam ranah demokrasi lokal,

terutama dalam konteks sosial-politik di Kota Bagansiapiapi. Kota ini, yang dalam masa sebelumnya lebih dikenal sebagai pusat bisnis perikanan, juga menyaksikan lonjakan populasi pendatang yang signifikan. Perkembangan ini mengakibatkan potensi adanya konflik keagamaan dan etnis yang perlu dijelajahi, isu-isu ini telah menjadi fokus banyak pembahasan, sementara juga penting untuk menjelajahi bagaimana simbol-simbol primordial muncul kuat dalam dinamika politik di tingkat lokal.

#### 5. Masyarakat Etnis Melayu dan Tionghoa

Pada konteks riset yang diberikan, tujuan riset adalah untuk merenung secara lebih mendalam mengenai Masyarakat Etnis Melayu dan Tionghoa serta bagaimana identitas memengaruhi domain politik. Identitas ini muncul karena kelompok etnik, agama, bahasa, dan faktor-faktor lain merasa perlu untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak dalam kerangka demokrasi, kebangsaan, dan pemerintahan negara. Kehadiran individu atau kelompok yang terlibat dalam proses ini sering kali membedakan dari kelompok lain, yang menghasilkan konsep identitas yang beragam. Meskipun perbedaan tersebut menonjol, perhatian utama dalam riset ini adalah menjelajahi aspek-aspek integrasi, yaitu faktor-faktor yang mendorong keseragaman di antara kelompok-kelompok yang beragam. Upaya untuk memahami aspek integrasi ini bertujuan untuk mengurangi perbedaan dan meningkatkan persamaan di antara kelompok-kelompok tersebut.

**Tabel 1.1 Informan Penelitian**

No.	Lembaga	Informan	Jumlah
1.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	Bupati Kabupaten Rokan Hilir Afrizal Sintong	1
2.	Lembaga Adat Melayu (LAM)	Lembaga Adat Melayu (LAM) Jufrizan	1
3.	Lembaga Adat Tionghoa (LAT)	Ketua Lembaga Adat Tionghoa (LAT) Darpin	1
4.	Lembaga Bagansiapiapi Tempo Doeloe	Ketua Lembaga Bagansiapiapi Tempo Doeloe Rio Almusta	1
5.	Masyarakat Etnis Melayu dan Tionghoa	Masyarakat Etnis Melayu tiga orang dan Tionghoa tiga orang	6

#### 1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Wawancara

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Untuk menentukan informen yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *sampling* yaitu pengambilan sumber data dengan menentukan kriteria mengenai responden mana saja yang dapat dipilih sebagai sampel. Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan subjek yang bersangkutan yaitu masyarakat dan tokoh politik di Kecamatan Bangko Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dan beberapa tokoh lainnya.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu strategi yang digunakan dalam proses pengumpulan data, di mana peneliti menggali berbagai informasi dari beragam sumber dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Jenis materi yang dimanfaatkan dalam metode ini mencakup beragam bentuk data, termasuk catatan tertulis, buku, dokumentasi visual seperti foto, berkas arsip, serta berbagai referensi dan materi dokumentasi lainnya yang terkait dengan subjek penelitian. Metode dokumentasi ini memungkinkan peneliti untuk mendalami konteks penelitian dengan mengkaji berbagai materi yang relevan.

### 1.9.5 Teknik Analisis Data

Di samping elemen-elemen yang sudah dibahas sebelumnya, sebuah karya tulis juga membutuhkan penerapan teknik analisis data yang esensial untuk merapikan data primer dan sekunder yang telah terhimpun. Data-data tersebut akan mengalami proses analisis dengan metode analisis isi (*content analysis*). Setelah seluruh data terkumpul, pendekatan analisis deskriptif analitik akan diterapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis secara cermat teori-teori yang terkait dengan demokrasi lokal dan peran etnis Tionghoa dalam kerangka mencapai stabilitas politik. Dengan demikian, seluruh kerangka teori dan teori yang terkait akan dipelajari dengan mendalam guna mencapai pemahaman yang komprehensif terkait dengan topik riset ini (Moleong, 2004).

Melalui telaah cermat terhadap dataset yang telah terkumpul, berbagai gambaran umum yang terkait dengan penelitian ini disekat hingga



sampai pada hasil-hasil yang lebih rinci melalui pemahaman mendalam berdasarkan teori-teori yang relevan. Tahap analisis data dalam penelitian ini mengadopsi metode yang dikembangkan oleh John W. Creswell, yang melibatkan lima tahap inti:

### **1. Reduksi Data**

Dalam rangka riset ini, peneliti berkomitmen untuk mendokumentasikan secara cermat semua hasil wawancara yang dikumpulkan dari lapangan yang mengeksplorasi secara komprehensif. Langkah berikutnya melibatkan proses reduksi data dengan pemilihan elemen-elemen penting, penyederhanaan informasi, dan transformasi data lapangan yang tersebar menjadi struktur yang lebih terorganisir.

### **2. Penyajian Data**

Pada tahap ini, dalam rangka menyajikan informasi, data-data yang diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan berbagai narasumber yang relevan dengan topik penelitian, akan diorganisir dan disajikan secara hati-hati. Tindakan berikutnya, peneliti akan melanjutkan dengan analisis mendalam atas data yang terhimpun dalam konteks penelitian ini.

### **3. Kodifikasi Data**

Pada dasarnya, coding merupakan organisir data dengan melakukan pengkategorian terhadap data-data baik secara deskripsi maupun gambar ke dalam kategori yang sama. Coding yang dapat dilakukan dengan cara manual ini digunakan untuk dapat menghasilkan deskripsi dari informasi dan keseluruhan data untuk dapat dianalisa.

#### **4. Interpretasi Analisa Data**

Dalam tahap ini, pendekatan yang sering dilakukan yaitu dengan menggunakan narasi dalam menjelaskan temuan dalam analisis. Penjelasan ini dilakukan dengan mendiskusikan bahasan yang saling terkait yang telah dikategorikan baik itu data-data deskriptif maupun data-data tabel, dan gambar.

#### **5. Menarik Kesimpulan**

Langkah paling akhir dalam proses riset ini adalah tahap penarikan kesimpulan yang didasarkan pada temuan yang diperoleh dari data lapangan setelah melalui tahap verifikasi. Kendati kesimpulan ini masih bersifat sementara, peneliti akan tetap terbuka untuk kemungkinan perubahan apabila ada bukti tambahan yang mendukung atau mengklarifikasi hasil riset.

Untuk mencapai kesimpulan ini, peneliti melakukan analisis perbandingan dengan riset lain yang relevan dengan topik ini. Data yang telah terkumpul dan melalui tahap analisis akan dikelompokkan, dan data yang dianggap relevan dengan tujuan riset akan diberikan prioritas.